



Meneguhkan Moderasi Beragama di Era *Post-Truth*: Analisis Tantangan Hoaks dan Ekstremisme Digital

Didi Sartika¹ Nurul Famili²

¹ IAIN Takengon, ² UNIMAL Lhokseumawe

Email: didiputrasinabang@gmail.com¹, nurulfamili2000@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received April 02, 2026

Revised April 17, 2026

Accepted April 24, 2026

Keywords:

Post-Truth, Hoaks, Ekstremisme Digital

ABSTRACT

This study aims to analyze the challenges of religious hoaxes and digital extremism in the post-truth era and to examine the role of religious moderation as a strategic solution. This research employs a qualitative approach using a library research method by analyzing relevant journals, books, and academic documents. The findings indicate that the post-truth era has transformed the religious sphere into a more open yet vulnerable space to information distortion. Religious hoaxes have been proven to trigger social polarization and weaken social cohesion, while digital extremism develops through exclusive narratives and online radicalization processes. In this context, religious moderation plays a crucial role as an adaptive approach to foster balance, tolerance, and social resilience. The implementation of religious moderation can be carried out through strengthening digital literacy, producing moderate religious narratives, and integrating these values into education and social life. Therefore, religious moderation serves as a key instrument in maintaining harmony and social stability amid the dynamics of the digital era.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 02, 2026

Revised April 17, 2026

Accepted April 24, 2026

Keywords:

Post-Truth, Hoaks, Ekstremisme Digital

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hoaks dan ekstremisme digital dalam kehidupan beragama di era *post-truth* serta mengkaji peran moderasi beragama sebagai solusi strategis. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan, melalui analisis berbagai jurnal ilmiah, buku, dan dokumen relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa era *post-truth* telah mentransformasi ruang keberagamaan menjadi lebih terbuka namun rentan terhadap distorsi informasi. Hoaks keagamaan terbukti memicu polarisasi sosial dan melemahkan kohesi masyarakat, sementara ekstremisme digital berkembang melalui narasi eksklusif dan proses radikalisasi daring. Dalam konteks ini, moderasi beragama berperan penting sebagai pendekatan adaptif untuk membangun keseimbangan, toleransi, dan ketahanan sosial. Implementasi moderasi beragama dilakukan melalui penguatan literasi digital, produksi narasi moderat, serta integrasi dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi kunci dalam menjaga harmoni dan stabilitas masyarakat di tengah dinamika era digital.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



**Corresponding Author:**

Didi Sartika

IAIN Takengon

Email: didiputrasinabang@gmail.com**PENDAHULUAN**

Pada era digital saat ini, penyebaran informasi tidak hanya terbatas pada ruang fisik atau kanal tradisional seperti media cetak dan siaran televisi. Teknologi digital dan media sosial telah mengubah cara masyarakat mengakses, berbagi, dan memahami informasi secara drastis. Proses ini, yang dikenal dengan istilah *post-truth*, ditandai oleh dominasi emosi, opini, dan narasi tertentu atas fakta objektif dalam sirkulasi publik digital, sehingga kebenaran sering kalah dari narasi emosional dan sensasional (Setia & Dilawati, 2024a). Fenomena *post-truth* ini memicu munculnya gelombang hoaks atau informasi palsu yang menyesatkan dan disebarkan dengan sengaja atau tidak sengaja sehingga yang berdampak luas terhadap pemahaman masyarakat terhadap isu sosial, politik, dan terutama agama. Pada konteks kehidupan beragama, hoaks bisa merusak tatanan kebersamaan, menciptakan kekacauan narasi keagamaan, dan melemahkan otoritas keagamaan yang selama ini menjadi penopang moderasi beragama. Misalnya, ketika isu tertentu dikemas secara emosional di media sosial tanpa dilakukan verifikasi, hal ini dapat memperkuat kecenderungan intoleransi atau bahkan mendorong munculnya sikap ekstremisme di kalangan pengguna digital (Hasmuni & Marhamah, 2025a).

Menurut Ulya (Ulya, 2018), *post-truth* yang dipenuhi hoaks berimplikasi pada meningkatnya tensi dalam masyarakat dan kecenderungan menuju polarisasi religius, termasuk potensi radikalisme ketika informasi palsu dijadikan pijakan legitimisasi sikap intoleran. Selain itu, hoaks yang berkaitan dengan aktivitas dakwah dan konten keagamaan seringkali menyesatkan dan memicu reaksi emosional yang kuat dari netizen (Maisari, 2025). Pada konteks Indonesia yang pluralistik, tantangan yang ditimbulkan oleh hoaks dan narasi ekstremisme digital menjadi sangat kompleks. Masyarakat Indonesia secara tradisional menjunjung nilai toleransi dan pluralisme; namun, rentannya tingkat literasi digital dan kecenderungan algoritma media sosial untuk memperkuat *echo chamber* (gelembung opini yang menguatkan pandangan tertentu) mempermudah penyebaran narasi ekstrem yang bertentangan dengan nilai moderasi beragama (Umam & Koestanto, 2024a).

Moderasi beragama sendiri merupakan konsep yang menekankan sikap *wasathiyah* keseimbangan dan toleransi dalam praktik keagamaan sebagai upaya dalam menjaga harmoni dalam kehidupan beragama. Strategi ini semakin penting ketika menghadapi *post-truth*, hoaks, dan narasi ekstrem digital yang menggema di berbagai platform media online. Dalam berbagai literatur, peneliti menggambarkan pentingnya moderasi sebagai mekanisme sosial yang membangun toleransi, mengurangi polarisasi, dan mendukung dialog antar umat beragama. Peran moderasi beragama menjadi semakin relevan ketika hoaks yang beredar seringkali berdampak pada frame bias atau pembingkaihan yang memperkuat stereotip, ketakutan, dan saling curiga di antara kelompok agama yang berbeda. Hoaks tidak hanya soal kebenaran fakta, tetapi bagaimana narasi negatif yang tersentralisasi dapat mengikis modal sosial yang mendukung toleransi dan solidaritas. Studi empiris menunjukkan bahwa informasi yang tidak terverifikasi di media sosial dapat menggiring persepsi publik terhadap radikalisme dan



intoleransi, serta memengaruhi keputusan keagamaan seseorang tanpa filter analitis yang memadai (Rajaminsah et al., 2025a)

Dampak yang lebih jauh lagi, ekstremisme digital merupakan bentuk lanjut dari implikasi *post-truth* yang lebih berbahaya. Ekstremisme digital biasanya mengacu pada ideologi yang eksklusif, intoleran, dan seringkali menggunakan cara-cara propaganda untuk merekrut dan memotivasi dukungan terhadap sikap radikal atau kekerasan berbasis identitas agama. Digitalisasi telah memberikan ruang tak terbatas bagi aktor ekstrem untuk menyebarkan konten mereka melalui feeds, hashtags, dan komunitas online yang mudah terpengaruh bila tidak didampingi dengan kapasitas literasi digital yang kuat. Dalam perspektif akademik, fenomena ini mengarah pada transformasi cara ekstremisme diproduksi dan disebarkan secara berskala global. Sejumlah penelitian internasional menggambarkan bagaimana narasi online yang berkaitan dengan ekstremisme (termasuk yang berbau religius) beroperasi sebagai mesin mobilisasi opini yang kuat, termasuk melalui strategi algoritma yang berpotensi memperkuat sikap selalu benar dan intoleran. Dalam konteks analisis data media sosial, konten pro-ekstrem seringkali memanfaatkan struktur algoritma rekomendasi untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, sedangkan narasi kontra-ekstrem perlu strategi komunikasi yang sama persuasifnya agar efektif dalam konteks moderasi yang ingin dibangun (Malik & Labib, 2025a)

Tantangan ini memperlihatkan bahwa moderasi beragama merupakan strategi sosial yang harus diinternalisasi, diperkuat, dan diinovasi agar relevan dengan cara informasi dan ideologi beredar di era digital. Dalam literatur Indonesia sendiri, sejumlah artikel telah membahas relevansi moderasi beragama dalam ruang digital, termasuk implikasinya terhadap toleransi, narasi keagamaan, dan bagaimana moderasi dapat menjadi landasan untuk menanggapi konten yang memecah belah masyarakat. Misalnya, studi tentang implementasi moderasi beragama dalam ruang digital menegaskan bahwa penggunaan media digital yang tidak diimbangi dengan kesadaran moderasi beragama dapat memberikan ruang bagi konten yang kontraproduktif terhadap toleransi dan keberagaman (Mahyudin et al., 2022a). Strategi komunikasi berbasis moderasi beragama juga menjadi fokus penelitian karena kemampuan narasi moderat untuk menolak hoaks dan propaganda ekstrem dengan cara yang lebih konstruktif dan inklusif. Penelitian mengenai *fact-checking* dalam perguruan tinggi menunjukkan bahwa integrasi nilai moderasi beragama dengan literasi informasi dapat memperkuat ketahanan mahasiswa terhadap hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda ekstremis di ruang digital, sehingga menghasilkan generasi yang lebih kritis terhadap arus informasi digital.

Selain itu, moderasi beragama juga dipandang sebagai penangkal disinformasi keagamaan secara umum. Kajian akademik menggarisbawahi peran moderasi sebagai pilar utama dalam menolak penyebaran hoaks dan disinformasi keagamaan, sekaligus membangun sikap analitis yang berlandaskan nilai moral serta etika informasi. Konteks kekinian menunjukkan bahwa pendidikan moderasi beragama dan literasi digital perlu dipadukan dalam kurikulum pendidikan agama untuk mendorong pemahaman keagamaan yang kritis terhadap fenomena *post-truth*. Strategi pendidikan ini tidak hanya menguatkan wawasan keagamaan, tetapi juga keterampilan literasi digital yang dibutuhkan untuk membedakan informasi akurat dan tidak akurat di ruang online (Lewandowsky et al., 2017). Kajian tentang dinamika moderasi beragama dalam masyarakat digital menunjukkan bahwa kampanye pesan moderat seringkali



menghadapi tantangan berupa *disruption narratives* yang melahirkan kontestasi dan fragmentasi pandangan agama di ruang digital. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman konseptual dan implementatif moderasi beragama sebagai respon terhadap fragmentasi sosial yang muncul dari mekanisme digitalisasi informasi

Dengan demikian, relevansi tema ini tidak hanya terletak pada identifikasi masalah hoaks dan ekstremisme digital semata, tetapi juga pada bagaimana moderasi beragama dapat berfungsi sebagai alat analisis dan praktik untuk mengatasi fenomena tersebut. Mengingat ruang digital telah menjadi arena utama pertukaran narasi keagamaan, penelitian tentang moderasi beragama dalam menghadapi tantangan *post-truth* menjadi sangat penting untuk dikembangkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fenomena moderasi beragama di era *post-truth*, khususnya dalam menghadapi hoaks dan ekstremisme digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memahami fenomena sosial secara komprehensif dengan menekankan pada makna, interpretasi, serta konteks yang melatarbelakangi suatu peristiwa (Rukin, 2019). Studi kepustakaan digunakan sebagai metode utama karena penelitian ini bertumpu pada analisis berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal bereputasi, dokumen kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali konsep, teori, dan temuan empiris yang berkaitan dengan moderasi beragama, hoaks, dan ekstremisme digital secara sistematis (Albi Anggito, 2018)

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal ilmiah dan buku-buku akademik yang relevan. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan relevansi dan kedalaman informasi yang mendukung analisis penelitian (Hani Subakti, dkk, 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Peneliti mengumpulkan, membaca, serta mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian untuk menemukan pola, konsep, dan hubungan antar variabel yang dikaji. Studi literatur juga berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar pengembangan analisis (Noor, 2015)

Adapun teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan, kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi, dan selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat induktif. Analisis ini menekankan pada pencarian makna serta pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Rukin, 2019). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi yang digunakan sehingga diperoleh informasi yang konsisten dan valid. Selain itu, penggunaan referensi yang memadai dan relevan juga menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas hasil penelitian (Fitrah, M, 2017). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang



komprehensif mengenai tantangan hoaks dan ekstremisme digital serta peran strategis moderasi beragama dalam menghadapi fenomena tersebut di era *post-truth*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Ruang Keberagamaan di Era *Post-Truth*

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam konstruksi ruang keberagamaan di masyarakat. Jika pada masa sebelumnya otoritas keagamaan lebih banyak ditentukan oleh institusi formal seperti ulama, pesantren, dan lembaga pendidikan, maka di era *post-truth* terjadi pergeseran signifikan menuju ruang keberagamaan yang lebih terbuka dan terdesentralisasi melalui media digital. Transformasi ini mengubah pola komunikasi keagamaan dan memengaruhi cara masyarakat memahami, menafsirkan, dan mempraktikkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena *post-truth* sendiri ditandai oleh dominasi emosi, keyakinan subjektif, dan opini personal dalam membentuk persepsi publik, yang seringkali mengesampingkan fakta objektif (Ulya, 2018). Dalam konteks ini, ruang digital menjadi arena utama pertarungan narasi, termasuk narasi keagamaan, yang tidak lagi sepenuhnya dikontrol oleh otoritas tradisional. Media sosial seperti *WhatsApp*, *Facebook*, dan *Instagram* telah menjadi “ruang tafsir baru” di mana individu bebas memproduksi dan menyebarkan interpretasi keagamaan tanpa batasan yang ketat.

Perubahan ini pada satu sisi memberikan peluang demokratisasi pengetahuan agama, namun di sisi lain juga membuka ruang bagi munculnya distorsi informasi dan pemahaman keagamaan yang tidak proporsional. (Rianto, 2019) menegaskan bahwa dalam era *post-truth*, penyebaran hoaks disebabkan oleh rendahnya literasi digital serta faktor etika komunikasi yang lemah, di mana individu cenderung mempercayai informasi yang sesuai dengan preferensi dan keyakinan mereka tanpa melakukan verifikasi. Dalam realitas sosial, kondisi ini memperlihatkan bahwa otoritas keagamaan mengalami pergeseran dari yang bersifat hierarkis menjadi horizontal. Artinya, siapa pun dapat menjadi “otoritas” di ruang digital selama memiliki akses dan kemampuan untuk menarik perhatian publik. Hal ini diperkuat oleh mekanisme algoritma media sosial yang lebih mengutamakan popularitas dan interaksi dibandingkan dengan validitas konten. Akibatnya, konten keagamaan yang bersifat provokatif, emosional, dan sensasional lebih mudah viral dibandingkan dengan konten yang berbasis kajian ilmiah dan moderasi.

Fenomena tersebut selaras dengan temuan Arifin dan Fuad yang menyatakan bahwa media sosial dalam era *post-truth* telah menjadi sarana utama penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, termasuk yang berbasis agama, yang mampu membentuk opini publik secara tidak terkendali (Arifin & Fuad, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital menjadi medium komunikasi dan juga menjadi arena konstruksi realitas sosial dan keagamaan yang sangat dinamis dan rentan terhadap manipulasi. Lebih lanjut, keberadaan *echo chamber* atau ruang gema dalam media sosial memperkuat fenomena ini. Individu cenderung berinteraksi dengan kelompok yang memiliki pandangan yang sama, sehingga memperkuat keyakinan yang sudah ada tanpa adanya kritik atau perspektif alternatif. Muqsith dan Pratomo menjelaskan bahwa algoritma media sosial berperan dalam menciptakan bias kebenaran (*truth bias*), di mana



pengguna hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan keyakinan mereka, sehingga kebenaran menjadi relatif dan subjektif (Muqsith & Pratomo, 2021) .

Dalam konteks keberagaman, kondisi ini sangat berbahaya karena dapat memunculkan fragmentasi pemahaman agama yang tajam. Setiap kelompok dapat mengembangkan interpretasi sendiri yang dianggap paling benar, tanpa adanya dialog atau verifikasi dari otoritas yang kredibel. Hal ini pada akhirnya dapat memicu konflik internal dalam komunitas keagamaan serta memperlemah kohesi sosial. Selain itu, fenomena *post-truth* juga mendorong lahirnya narasi keagamaan yang bersifat instan dan simplistik. Ajaran agama yang seharusnya dipahami secara komprehensif dan kontekstual seringkali direduksi menjadi slogan-slogan singkat yang mudah viral di media sosial. Dominasi emosi dalam komunikasi digital menyebabkan informasi yang beredar lebih menekankan aspek sensasional dibandingkan dengan akurasi dan objektivitas (Siregar et al., n.d.) . Pada kondisi ini masyarakat menjadi lebih rentan terhadap manipulasi narasi keagamaan yang dapat mengarah pada sikap intoleran dan eksklusif. Bahkan, dalam beberapa kasus, narasi keagamaan yang menyimpang dapat digunakan sebagai alat legitimasi untuk tindakan ekstremisme. Oleh karena itu, transformasi ruang keberagaman di era *post-truth* tidak dapat dipandang sebagai fenomena netral, melainkan sebagai tantangan serius yang memerlukan respon strategis. Penelitian Sharine dan Sitorus menunjukkan bahwa fenomena *post-truth* berbasis ideologi dapat memperkuat polarisasi sosial dan mengancam stabilitas masyarakat, karena informasi yang beredar tidak lagi berbasis fakta, tetapi pada narasi yang sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu (Sharine & Sitorus, 2024) . Dalam konteks keberagaman, hal ini dapat memperdalam jurang perbedaan antar kelompok serta menghambat terciptanya dialog yang konstruktif.

Transformasi ruang keberagaman juga dipengaruhi oleh meningkatnya intensitas penggunaan media digital dalam kehidupan sehari-hari. Penyebaran *fake news* di era *post-truth* menjadi tantangan serius bagi komunikasi publik karena mampu memengaruhi persepsi masyarakat secara luas, terutama ketika tidak diimbangi dengan literasi media yang memadai (Sjoraida, 2025). Dapat dipahami bahwa transformasi ruang keberagaman di era *post-truth* mengubah epistemologi masyarakat dalam memahami kebenaran. Kebenaran tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang objektif dan universal, tetapi menjadi relatif dan tergantung pada persepsi individu atau kelompok. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan baru dalam memahami dan mengelola keberagaman di masyarakat.

Sebagai respon terhadap fenomena ini, diperlukan upaya penguatan moderasi beragama yang mampu beradaptasi dengan dinamika digital. Moderasi beragama harus dipahami sebagai konsep normatif melalui strategi komunikasi yang efektif dalam menghadapi arus informasi yang tidak terkendali. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan media digital sebagai sarana untuk menyebarkan narasi keagamaan yang moderat, inklusif, dan berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan. Penguatan literasi digital juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Literasi digital ini mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi serta kemampuan kritis dalam memahami dan mengevaluasi informasi. Adanya sosialisasi literasi media dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya hoaks dan membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih bijak dalam menyikapi informasi.



Dengan demikian, transformasi ruang keberagamaan di era *post-truth* merupakan fenomena yang multidimensional. Di satu sisi, ia membuka peluang bagi demokratisasi pengetahuan agama, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan berupa distorsi informasi, polarisasi, dan potensi ekstremisme. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan adaptif, dengan menempatkan moderasi beragama sebagai strategi utama dalam menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan beragama di era digital.

2. Hoaks Keagamaan sebagai Pemicu Polarisasi dan Disintegrasi Sosial

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa hoaks keagamaan memiliki kontribusi signifikan dalam mempercepat terjadinya polarisasi sosial di era *post-truth*. Hoaks telah berkembang menjadi instrumen ideologis yang digunakan untuk membentuk opini, memperkuat identitas kelompok, dan dalam banyak kasus, memicu konflik sosial berbasis agama (Ulya, 2018). Dalam konteks masyarakat digital, hoaks keagamaan menjadi semakin berbahaya karena penyebarannya yang cepat, luas, dan sulit dikendalikan. Fenomena hoaks dalam era *post-truth* ditandai oleh kecenderungan masyarakat untuk lebih mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan dan emosi mereka dibandingkan dengan fakta objektif. Kondisi ini diperkuat oleh adanya *confirmation bias*, yaitu kecenderungan individu untuk mencari dan menerima informasi yang menguatkan pandangan yang sudah dimiliki (Lewandowsky et al., 2017). Bias ini membuat individu lebih mudah menerima hoaks yang mendukung identitas kelompoknya, sekalipun informasi tersebut tidak memiliki dasar yang valid.

Hoaks keagamaan umumnya dikemas dalam bentuk narasi yang provokatif dan emosional, seringkali menggunakan simbol-simbol agama, kutipan ayat atau hadis yang dipotong, serta bahasa yang bersifat dikotomis seperti “kita” versus “mereka”. Strategi ini bertujuan untuk membangun solidaritas kelompok sekaligus menciptakan jarak dengan kelompok lain. Fenomena ini sebagai bagian dari *information disorder*, yaitu kondisi di mana informasi yang salah atau menyesatkan disebarkan secara sistematis untuk memengaruhi persepsi publik. Dalam realitas sosial di Indonesia, hoaks keagamaan seringkali muncul dalam isu-isu sensitif seperti penodaan agama, konflik antar kelompok, hingga narasi politik identitas. Hoaks semacam ini dapat menimbulkan kesalahpahaman sehingga memicu reaksi emosional yang berlebihan dari masyarakat. Penelitian Setia dan Dilawati menunjukkan bahwa hoaks berbasis agama di media sosial memiliki potensi besar dalam memperkuat polarisasi karena menyentuh aspek identitas yang paling mendasar dalam diri individu (Setia & Dilawati, 2024b).

Ketika masyarakat terpapar secara terus-menerus pada informasi yang menyesatkan, mereka cenderung kehilangan kepercayaan terhadap kelompok lain, bahkan terhadap institusi yang seharusnya menjadi penengah, seperti pemerintah dan lembaga keagamaan. Hal ini sejalan dengan temuan (Ulya, 2018) yang menyatakan bahwa hoaks dalam era *post-truth* dapat merusak tatanan sosial karena menciptakan realitas semu yang diyakini sebagai kebenaran oleh kelompok tertentu. Polarisasi sosial yang dihasilkan oleh hoaks keagamaan tidak hanya bersifat horizontal (antar kelompok masyarakat), tetapi juga vertikal, yaitu antara masyarakat dengan pemerintah atau otoritas keagamaan. Hoaks seringkali digunakan untuk menyebarkan narasi konspiratif yang mendeligitimasi kebijakan pemerintah atau fatwa keagamaan tertentu. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan memperlemah integrasi



nasional. Selain faktor psikologis, penyebaran hoaks keagamaan juga dipengaruhi oleh faktor struktural, yaitu algoritma media sosial. Penelitian Hasmuni dan Marhamah menunjukkan bahwa strategi komunikasi keagamaan yang tidak adaptif terhadap perkembangan digital turut berkontribusi terhadap maraknya hoaks. Ketika narasi keagamaan yang moderat tidak hadir secara aktif di ruang digital, maka ruang tersebut akan diisi oleh narasi yang lebih ekstrem dan provokatif (Hasmuni & Marhamah, 2025b). Hal ini menunjukkan pentingnya kehadiran aktor-aktor moderat dalam memproduksi dan menyebarkan konten keagamaan yang konstruktif.

Dari sisi dampak, hoaks keagamaan dapat memicu konflik sosial yang nyata. Dalam beberapa kasus, informasi palsu yang beredar di media sosial telah menyebabkan kerusuhan, perpecahan komunitas, bahkan kekerasan fisik. Hal ini menunjukkan bahwa hoaks bukan sekadar masalah informasi, tetapi juga memiliki konsekuensi nyata dalam kehidupan sosial. Untuk mengatasi fenomena ini. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah penguatan literasi digital berbasis nilai moderasi beragama yang mengajarkan cara menggunakan teknologi serta sikap kritis dan etis dalam menyikapi informasi, adanya pendekatan *fact-checking* berbasis moderasi beragama dapat meningkatkan ketahanan individu terhadap hoaks dan propaganda ekstremis (Malik & Labib, 2025b). Selain itu, penting untuk mengembangkan budaya *tabayyun* dalam masyarakat, yaitu sikap untuk memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Nilai ini sebenarnya telah lama diajarkan dalam tradisi Islam, namun perlu direaktualisasikan dalam konteks digital. Dengan menginternalisasikan nilai *tabayyun*, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan platform digital. Kolaborasi ini diperlukan untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan mendukung penyebaran narasi yang positif. Moderasi beragama dapat menjadi landasan dalam membangun komunikasi yang inklusif dan mengurangi potensi konflik akibat hoaks. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hoaks keagamaan merupakan salah satu faktor utama yang memicu polarisasi dan disintegrasi sosial di era *post-truth*. Fenomena dipengaruhi oleh faktor individu serta struktur teknologi dan dinamika sosial yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang integratif dengan menempatkan moderasi beragama sebagai strategi utama dalam membangun ketahanan sosial terhadap disinformasi.

3. Ekstremisme Digital sebagai Ancaman Nyata dalam Kehidupan Beragama

Ekstremisme digital dapat dipahami sebagai proses penyebaran ideologi radikal melalui media digital yang dilakukan secara cepat, luas, dan sulit dikontrol. Mansyur dkk. menjelaskan bahwa digitalisasi telah melahirkan tantangan baru berupa digital *radicalism*, yaitu penyebaran ideologi ekstrem melalui media sosial yang dapat mengancam keamanan ideologis, nilai toleransi, dan keberagaman dalam masyarakat (Mansyur et al., 2026). Fenomena ini menunjukkan bahwa transformasi digital disamping membawa manfaat, tetapi juga dapat berisiko terhadap kehidupan beragama dan sosial. Ekstremisme digital seringkali dimulai dari penyebaran narasi yang bersifat eksklusif dan absolut. Narasi ini biasanya mengklaim kebenaran tunggal (*truth claim*), menolak perbedaan, serta mendelegitimasi kelompok lain. Berkembangnya paham radikal dan intoleran dalam masyarakat digital dapat memicu konflik



internal maupun eksternal dalam komunitas keagamaan, sehingga mengancam keberlangsungan kehidupan sosial yang harmonis (Sukarman et al., 2019).

Lebih jauh, ekstremisme digital juga berkaitan erat dengan fenomena *self-radicalization* atau swa-radikalisasi, yaitu proses di mana individu menjadi radikal secara mandiri melalui paparan konten digital tanpa keterlibatan langsung organisasi tertentu. Media sosial memberikan ruang yang sangat luas bagi individu untuk mengakses dan menginternalisasi ideologi ekstrem, sehingga proses radikalisasi dapat terjadi secara cepat dan tanpa pengawasan (Sulfikar, 2019). Hal ini menjadi tantangan serius karena radikalisasi tidak lagi bersifat terpusat, tetapi tersebar dan sulit dideteksi.

Karakteristik ekstremisme digital juga semakin kompleks dengan adanya dukungan teknologi seperti algoritma media sosial dan kecerdasan buatan. Konten ekstremis seringkali dirancang secara strategis untuk menarik perhatian pengguna, menggunakan visual yang kuat, narasi emosional, dan teknik persuasi yang efektif. Perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan, telah memperkuat kemampuan produksi dan distribusi konten keagamaan, termasuk yang bersifat manipulatif dan ekstrem (Hamka Ilyas et al., 2025). Ekstremisme digital juga memanfaatkan kelemahan literasi digital masyarakat. Banyak pengguna media sosial yang tidak memiliki kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis, sehingga mudah terpengaruh oleh narasi ekstrem. Rendahnya literasi keagamaan digital menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan generasi muda rentan terhadap pengaruh radikalisme di ruang digital.

Penyebaran ideologi ekstrem dapat mempersempit ruang dialog, memperkuat sikap intoleran, dan dalam beberapa kasus, memicu tindakan kekerasan. penyebaran radikalisme dan ekstremisme di ruang digital menjadi salah satu faktor utama terjadinya disintegrasi sosial dalam masyarakat pluralistik. Kelompok ekstrem menggunakan media digital untuk membangun identitas kolektif, menciptakan musuh bersama, serta memobilisasi dukungan. Ummah menjelaskan bahwa narasi dalam media digital memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi publik, sehingga dapat digunakan sebagai alat efektif dalam menyebarkan ideologi radikal maupun kontra-radikal (Ummah, 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa ekstremisme digital dipandang sebagai masalah individu dan struktural yang melibatkan interaksi antara teknologi, ideologi, dan dinamika sosial.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui penguatan moderasi beragama sebagai strategi utama dalam menghadapi ekstremisme digital. Moderasi beragama menekankan pada sikap inklusif, toleran, dan seimbang dalam memahami ajaran agama, sehingga dapat menjadi benteng terhadap pengaruh ideologi ekstrem. Samheri dkk. menekankan pentingnya pengembangan *counter-narrative* berbasis moderasi beragama untuk melawan narasi ekstrem di ruang digital (Samheri et al., 2025a). Selain itu, penguatan literasi digital juga menjadi kunci dalam mengatasi ekstremisme digital. Pendekatan literasi digital berbasis nilai sosial-keagamaan dapat membantu individu keluar dari pengaruh radikalisme dan membangun pemahaman yang lebih moderat. Upaya lain yang tidak kalah penting adalah kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan platform digital. Kolaborasi ini diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan mampu menekan penyebaran konten ekstrem. Selain itu, regulasi terhadap konten digital juga perlu diperkuat untuk mencegah penyebaran ideologi yang berbahaya.



4. Moderasi Beragama sebagai Strategi Adaptif dan Solutif di Era Digital

Menghadapi kompleksitas tantangan era *post-truth*, khususnya terkait hoaks dan ekstremisme digital, moderasi beragama muncul sebagai pendekatan strategis yang adaptif dan solutif. Moderasi beragama harus dimaknai sebagai sikap tengah (*wasathiyah*), menjadikannya sebagai kerangka berpikir dan bertindak yang mampu menjembatani perbedaan, meredam konflik, serta memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat multikultural. Secara konseptual, moderasi beragama menekankan pada keseimbangan antara teks dan konteks, antara keyakinan dan toleransi, serta antara identitas keagamaan dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dalam konteks digital, moderasi beragama harus mampu bertransformasi menjadi pendekatan yang responsif terhadap dinamika teknologi dan perubahan pola komunikasi masyarakat. Moderasi beragama di ruang digital menjadi sangat penting karena media digital telah menjadi arena utama dalam membentuk wacana keagamaan kontemporer.

Moderasi beragama juga dapat diimplementasikan melalui produksi narasi keagamaan yang inklusif dan konstruktif di media digital. Dalam konteks ini, penting bagi aktor-aktor keagamaan, seperti ulama, akademisi, dan pendidik, untuk aktif memanfaatkan platform digital dalam menyebarkan pesan-pesan moderat. Umam dan Koestanto menegaskan bahwa ruang digital harus diisi dengan konten keagamaan yang edukatif, toleran, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat agar mampu bersaing dengan narasi ekstrem yang lebih provokatif (Umam & Koestanto, 2024b). Narasi moderat yang disampaikan secara tepat dan menarik dapat menjadi alternatif yang efektif dalam melawan propaganda ekstrem. Penguatan narasi moderasi beragama di ruang digital dapat menekan penyebaran ideologi radikal serta membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya toleransi dan keberagaman (Samheri et al., 2025b).

Dalam konteks pendidikan, moderasi beragama perlu diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum, khususnya dalam pendidikan agama. Pendidikan berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan serta sebagai media pembentukan karakter dan sikap keberagaman yang moderat. Internalisasi nilai moderasi beragama dalam pendidikan dapat menjadi benteng yang efektif dalam menghadapi disinformasi dan ekstremisme di kalangan generasi muda. Selain melalui pendidikan formal, moderasi beragama juga dapat dikembangkan melalui pendekatan berbasis komunitas. Dinamika pengarusutamaan moderasi beragama menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas dalam menyebarkan nilai moderasi dapat meningkatkan ketahanan sosial terhadap pengaruh negatif media digital (Mahyudin et al., 2022b).

Namun demikian, implementasi moderasi beragama di era digital juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah dominasi narasi ekstrem yang lebih menarik dan mudah viral dibandingkan dengan narasi moderat. Hal ini disebabkan oleh karakteristik media sosial yang cenderung mengutamakan konten yang sensasional dan emosional. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang kreatif dan inovatif dalam menyampaikan pesan moderasi beragama. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya moderasi beragama juga menjadi kendala dalam implementasinya. Banyak individu yang masih memahami agama secara sempit dan eksklusif, sehingga sulit menerima perbedaan. Maka diperlukan pendekatan yang lebih persuasif dan dialogis untuk membangun pemahaman yang lebih inklusif. Pendekatan berbasis teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung moderasi beragama. Penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam mendeteksi dan menghapus konten ekstrem, serta pengembangan algoritma yang mendukung



penyebaran konten positif, dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat.

Dengan demikian, moderasi beragama memiliki potensi besar sebagai strategi adaptif dan solutif dalam menghadapi tantangan era *post-truth*. Moderasi beragama berfungsi sebagai konsep normative melalui pendekatan praktis yang dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik melalui pendidikan, media digital, maupun interaksi sosial. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan moderasi beragama di era digital sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam mengadaptasi nilai-nilai tersebut ke dalam praktik kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan kolaboratif untuk memastikan bahwa moderasi beragama dapat menjadi fondasi dalam membangun kehidupan beragama yang damai, toleran, dan inklusif di tengah tantangan *post-truth*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa era *post-truth* telah membawa perubahan mendasar dalam lanskap keberagamaan, khususnya melalui transformasi ruang digital yang menjadi arena utama produksi dan distribusi narasi keagamaan. Pergeseran dari otoritas keagamaan yang bersifat hierarkis menuju ruang digital yang lebih terbuka telah menciptakan peluang demokratisasi pengetahuan agama, namun sekaligus melahirkan tantangan serius berupa distorsi informasi, melemahnya otoritas keilmuan, serta meningkatnya subjektivitas dalam memahami ajaran agama. Dalam konteks ini, kebenaran tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh validitas ilmiah, melainkan seringkali oleh kekuatan narasi, emosi, dan algoritma media sosial. Fenomena hoaks keagamaan terbukti menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat terjadinya polarisasi dan disintegrasi sosial. Munculnya informasi palsu menjadi instrumen ideologis yang mampu membentuk opini publik, memperkuat identitas kelompok, serta menciptakan dikotomi sosial yang tajam. Penyebaran hoaks yang didukung oleh *confirmation* bias dan sistem algoritma media sosial telah memperparah fragmentasi sosial, melemahkan kohesi masyarakat, serta menurunkan tingkat kepercayaan terhadap institusi keagamaan maupun negara. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mengancam stabilitas sosial, khususnya dalam masyarakat yang plural dan multikultural.

Selain itu, ekstremisme digital muncul sebagai ancaman nyata yang semakin kompleks dalam kehidupan beragama. Ekstremisme bertransformasi melalui media digital dengan strategi yang lebih sistematis, persuasif, dan sulit dideteksi. Proses radikalisasi yang terjadi secara daring, termasuk fenomena *self-radicalization*, menunjukkan bahwa individu dapat terpapar ideologi ekstrem tanpa interaksi langsung dengan kelompok tertentu. Hal ini diperkuat oleh rendahnya literasi digital dan keagamaan, serta dominasi narasi eksklusif yang menolak keberagaman. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, moderasi beragama terbukti memiliki peran strategis sebagai pendekatan yang adaptif dan solutif yang mampu menjembatani perbedaan, memperkuat toleransi, serta membangun ketahanan sosial terhadap pengaruh negatif era digital. Implementasi moderasi beragama di era *post-truth* memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi penguatan literasi digital berbasis nilai keagamaan,



produksi narasi moderat yang inklusif di media digital, integrasi dalam sistem pendidikan, serta penguatan peran komunitas dalam membangun kesadaran kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arifin, N. F., & Fuad, A. J. (2021). Dampak Post-Truth di Media Sosial. *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 10(3), 376–378. <https://doi.org/10.33367/ji.v10i3.1430>
- Fitrah, M, L. (2017). *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Hamka Ilyas, Abd. Bashir Fatmal, & La Ode Ismail Ahmad. (2025). Digital Jihad in Qur’anic Perspective: An Islamic Response to the Challenges of Cyberspace in the Age of Artificial Intelligence (AI). *QOF*, 9(2), 189–206. <https://doi.org/10.30762/qof.v9i2.3091>
- Hani Subakti, dkk. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Media Sains Indonesia.
- Hasmuni, H., & Marhamah, M. (2025a). Islamic Communication Strategies in Addressing Religious Hoaxes on Social Media. *JURNAL HURRIAH: Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian*, 6(4), 1282–1298. <https://doi.org/10.56806/jh.v6i4.352>
- Hasmuni, H., & Marhamah, M. (2025b). Islamic Communication Strategies in Addressing Religious Hoaxes on Social Media. *JURNAL HURRIAH: Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian*, 6(4), 1282–1298. <https://doi.org/10.56806/jh.v6i4.352>
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., & Cook, J. (2017). Beyond misinformation: Understanding and coping with the “post-truth” era. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 6(4), 353–369. <https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2017.07.008>
- Mahyudin, Habib, M. A. F., & Sulvinajayanti. (2022a). DINAMIKA PENGARUSUTAMAAN MODERASI BERAGAMA DALAM PERKEMBANGAN MASYARAKAT DIGITAL. *ASKETIK*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.30762/asketik.v6i1.181>
- Mahyudin, Habib, M. A. F., & Sulvinajayanti. (2022b). DINAMIKA PENGARUSUTAMAAN MODERASI BERAGAMA DALAM PERKEMBANGAN MASYARAKAT DIGITAL. *ASKETIK*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.30762/asketik.v6i1.181>
- Maisari, A. (2025). Tantangan Radikalisme dan Ekstremisme: Kajian Kritis Terhadap Ekstremisme Perspektif Moderasi Beragama. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 7(2), 146–159. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v7i2.883>



- Malik, M. U. I., & Labib, M. (2025a). Fact-Checking: Literasi Informasi Berbasis Moderasi Beragama sebagai Upaya Deradikalisasi di Perguruan Tinggi. *Jurnal Penelitian Agama*, 26(1), 115–136. <https://doi.org/10.24090/jpa.v26i1.2025.pp115-136>
- Malik, M. U. I., & Labib, M. (2025b). Fact-Checking: Literasi Informasi Berbasis Moderasi Beragama sebagai Upaya Deradikalisasi di Perguruan Tinggi. *Jurnal Penelitian Agama*, 26(1), 115–136. <https://doi.org/10.24090/jpa.v26i1.2025.pp115-136>
- Mansyur, M. A., Al Fath, R., & Kurniati, K. (2026). DIGITAL RADICALISM: IDEOLOGICAL SECURITY CHALLENGES IN THE SOCIAL MEDIA ERA. *ANAYASA: Journal of Legal Studies*, 3(2), 83–92. <https://doi.org/10.61397/ays.v3i2.493>
- Muqsith, M. A., & Pratomo, R. R. (2021). The Development of Fake News in the Post-Truth Age. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 8(5), 1391–1406. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22395>
- Noor, Z. Z. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Deepublish.
- Rajaminsah, R., Yudiyanto, M., Firdausi, M. I., Musoddiq, M., & Anisa, R. (2025a). Moderasi Beragama dan Literasi Digital: Pengembangan Kurikulum PAI Adaptif terhadap Tantangan Era Post-Truth. *ALACRITY: Journal of Education*, 1052–1065. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v5i2.854>
- Rajaminsah, R., Yudiyanto, M., Firdausi, M. I., Musoddiq, M., & Anisa, R. (2025b). Moderasi Beragama dan Literasi Digital: Pengembangan Kurikulum PAI Adaptif terhadap Tantangan Era Post-Truth. *ALACRITY: Journal of Education*, 1052–1065. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v5i2.854>
- Rianto, P. (2019). LITERASI DIGITAL DAN ETIKA MEDIA SOSIAL DI ERA POST-TRUTH. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 24. <https://doi.org/10.14710/interaksi.8.2.24-35>
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed., Vol. 1). Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Samheri, Fathurrosyid, & Fairuzah. (2025a). Kontranarasi Ekstrimisme di Ruang Digital: Strategi Pendampingan Peningkatan Agensi Nalar Moderasi Beragama pada Fatayat NU Sumenep. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 101–115. <https://doi.org/10.37567/pkm.v5i2.3710>
- Samheri, Fathurrosyid, & Fairuzah. (2025b). Kontranarasi Ekstrimisme di Ruang Digital: Strategi Pendampingan Peningkatan Agensi Nalar Moderasi Beragama pada Fatayat NU Sumenep. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 101–115. <https://doi.org/10.37567/pkm.v5i2.3710>



- Setia, P., & Dilawati, R. (2024a). Religiosity in the Digital Era and the Challenges of Hoaxes, Post-Truth and Radicalism on Social Media. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 4(1), 67–76. <https://doi.org/10.15575/jis.v4i1.33230>
- Setia, P., & Dilawati, R. (2024b). Religiosity in the Digital Era and the Challenges of Hoaxes, Post-Truth and Radicalism on Social Media. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 4(1), 67–76. <https://doi.org/10.15575/jis.v4i1.33230>
- Sharine, S., & Sitorus, F. K. (2024). Apakah Post-Truth Berbasis Ideologi Membahayakan Demokrasi: Perspektif Penyebaran Fakta Di Media Sosial. *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 4(2), 399–404. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i2.1677>
- Siregar, A. R., Harahap, A., & Nasution, M. S. (n.d.). *Etika Komunikasi Media Digital di Era Post-Truth*.
- Sjoraida, D. F. (2025). *Public Communication and Fake News: Combating Misinformation in the Post-Truth Era*. 3.
- Sukarman, S., Raharjo, R., & Syukur, F. (2019). Deradikalisasi Agama di Era Digital Melalui Pendidikan Islam Multikultural. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(2), 171–186. <https://doi.org/10.21580/jish.42.4734>
- Sulfikar, A. (2019). Swa-radikalisasi Melalui Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Jurnalisa*, 4(1). <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v4i1.5622>
- Ulya, U. (2018). Post-Truth, Hoax, dan Religiusitas di Media Sosial. *FIKRAH*, 6(2), 283. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v6i2.4070>
- Umam, F., & Koestanto, R. R. D. (2024a). Konsep Dan Implementasi Moderasi Beragama dalam Ruang Digital. *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)*, 1(2), 240–251. <https://doi.org/10.38073/aijis.v1i2.1555>
- Umam, F., & Koestanto, R. R. D. (2024b). Konsep Dan Implementasi Moderasi Beragama dalam Ruang Digital. *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)*, 1(2), 240–251. <https://doi.org/10.38073/aijis.v1i2.1555>
- Ummah, A. H. (2020). Digital Media and Counter Narrative of Radicalism. *Jurnal Theologia*, 31(2), 233–256. <https://doi.org/10.21580/teo.2020.31.2.6762>